



GUBERNUR MALUKU UTARA

**PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis/penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan/terjadi kebutuhan yang mendesak, maka arah dan kebijakan umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta strategi dan prioritas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dilakukan dan telah disepakati tanggal 28 Oktober 2013;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang – Undang Nonnomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
 9. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 10. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

- (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5209);
22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013;
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16

- Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 525);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2013 (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 309);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 27. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 903-7091 Tanggal 13 November Tahun 2013 tentang Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA
DAN
GUBERNUR MALUKU UTARA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN
ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Pendapatan	<u>Rp. 1.524.774.968.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.524.774.968.000,00

2. Belanja

b. Belanja	<u>Rp. 1.621.925.000.000,00</u>
Jumlah Belanja	Rp. 1.621.925.000.000,00
Surplus/Defisit	Rp. (97.150.032.000,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	
1) Penerimaan	<u>Rp. 124.242.088.000,00</u>
Jumlah Penerimaan	Rp. 124.242.088.000,00
b. Pengeluaran	
1) Pengeluaran	<u>Rp. 2.500.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran	Rp. 2.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 121.742.088.000,00

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Anggaran	<u>Rp. 237.439.729.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp. 237.439.729.000,00

b. Dana Perimbangan

1) Anggaran	<u>Rp. 1.046.232.579.000,00</u>
-------------	---------------------------------

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Jumlah Dana Perimbangan | Rp. 1.046.232.579.000,00 |
|-------------------------|---------------------------------|
- c. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- | | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| 1) Anggaran | <u>Rp. 241.102.660.000,00</u> |
| Jumlah Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | Rp. 241.102.660.000,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :
- a. Hasil Pajak Daerah
- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| 1) Anggaran | <u>Rp. 171.723.720.000,00</u> |
| Jumlah Pajak Daerah | Rp. 171.723.720.000,00 |
- b. Hasil Retribusi Daerah
- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1) Anggaran | <u>Rp. 43.367.707.000,00</u> |
| Jumlah Retribusi Daerah Setelah | Rp. 43.367.707.000,00 |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- | | |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| 1) Anggaran | Rp. 0,00 |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | Rp. 0,00 |
- d. Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- | | |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 1) Anggaran | <u>Rp. 22.177.960.000,00</u> |
| Jumlah Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | Rp. 22.177.960.000,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1)Anggaran | <u>Rp. 203.953.037.000,00</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil | Rp. 203.953.037.000,00 |
- b. Dana Alokasi Umum
- | | |
|-------------|-------------------------------|
| 1) Anggaran | <u>Rp. 772.591.162.000,00</u> |
|-------------|-------------------------------|

Jumlah Dana Alokasi Umum	Rp. 772.591.162.000,00
c. Dana Alokasi Khusus	
1) Anggaran	<u>Rp. 69.688.380.000,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus	Rp. 69.688.380.000,00
(4) Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan	
a. Hibah	
1) Anggaran	<u>Rp. 88.289.650.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah	Rp. 88.289.650.000,00
b. Dana Darurat	
1) Anggaran	Rp. 0,00
Jumlah Dana Dana Darurat	Rp. 0,00
c. Dana Bagi Hasil	
1) Anggaran	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak	Rp. 0,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1) Anggaran	<u>Rp 152.813.010.000,00</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp. 152.813.010.000,00
e. Bantuan Keuangan dari PROVINSI atau Pemerintah Daerah lainnya	
1) Anggaran	Rp 0,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari PROVINSI atau Pemerintah Daerah Lainnya	Rp. 0,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | |
| 1) Anggaran | Rp. 622.231.149.000,00 |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | Rp.622.231.149.000,00 |

- | | | |
|-------------------------|--|-------------------------------|
| b. Belanja Langsung | | |
| 1) Anggaran | | Rp.999.693.851.000,00 |
| Jumlah Belanja Langsung | | Rp. 999.693.851.000,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- | | | |
|---------------------------------|------------|------------------------------|
| a. Belanja Pegawai | | |
| 1) Anggaran | | Rp.224.853.839.000,00 |
| Jumlah Belanja Pegawai | | Rp.224.853.839.000,00 |
| b. Belanja Bunga | | |
| 1) Anggaran | Rp. | 0,00 |
| Jumlah Belanja Bunga | Rp. | 0,00 |
| c. Belanja Subsidi | | |
| 1) Anggaran | Rp. | 0,00 |
| Jumlah Belanja Subsidi | Rp. | 0,00 |
| d. Belanja Hibah | | |
| 1) Anggaran | | Rp.332.638.355.000,00 |
| Jumlah Belanja Hibah Setelah | | Rp.332.638.355.000,00 |
| e. Belanja Bantuan Sosial | | |
| 1) Anggaran | | Rp. 27.463.930.000,00 |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial | | Rp. 27.463.930.000,00 |
| f. Belanja Bagi Hasil | | |
| 1) Anggaran | | Rp. 34.275.025.000,00 |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil | | Rp. 34.275.025.000,00 |
| g. Belanja Bantuan Keuangan | | |
| 1) Anggaran | Rp. | 900.000.000,00 |
| Jumlah belanja Bantuan Keuangan | Rp. | 900.000.000,00 |
| h. Belanja Tidak Terduga | | |
| 1) Anggaran | Rp. | 2.100.000.000,00 |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga | Rp. | 2.100.000.000,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1) Anggaran	Rp. 91.694.736.000,00	
Jumlah Belanja Pegawai	Rp. 91.694.736.000,00	
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Anggaran	Rp.382.057.356.000,00	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	Rp.382.057.356.000,00	
c. Belanja Modal		
1) Anggaran	Rp.525.941.759.000,00	
Jumlah Belanja Modal	Rp.525.941.759.000,00	

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|--------------------|-------------------------------|--|
| a. Penerimaan | | |
| 1) Anggaran | Rp. 124.242.088.000,00 | |
| Jumlah Penerimaan | Rp. 124.242.088.000,00 | |
| b. Pengeluaran | | |
| 1) Anggaran | Rp. 2.500.000.000,00 | |
| Jumlah Pengeluaran | Rp. 2.500.000.000,00 | |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | |
|----------------------------------------------------|------------------------------|--|
| a. SILPA TA berkenaan | | |
| 1) Anggaran | Rp. 24.592.056.000,00 | |
| Jumlah SILPA TA berkenaan | Rp. 24.592.056.000,00 | |
| b. Pencairan Dana Cadangan | | |
| 1) Anggaran | Rp. - | |
| Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah | Rp. - | |
| c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | |
| 1) Anggaran | Rp. - | |
| Jumlah Penjualan Kekayaan Daerah | Rp. - | |

d.	Penerimaan Pinjaman Daerah		
	1) Anggaran	Rp.	-
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp.	-
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
	1) Anggaran	Rp.	-
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Rp.	-
f.	Penerimaan Piutang Daerah		
	1) Anggaran	Rp.	-
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah	Rp.	-
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
	a. Pembentukan Dana Cadangan		
	1) Anggaran	Rp.	-
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan	Rp.	-
	b. Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah		
	1) Anggaran	Rp.	2.500.000.000,00
	Jumlah Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah	Rp.	2.500.000.000,00
	c. Pembayaran Pokok Utang		
	1) Anggaran	Rp.	-
	Jumlah Pembayaran Pokok Uang	Rp.	-
	d. Pemberian Pinjaman Daerah		
	1) Anggaran	Rp.	-
	Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	Rp.	-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Investasi Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain – lain;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan – kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 6

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Gubernur Maluku Utara menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2013

Pasal 8

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi
Pada Tanggal 18 November 2013

Pj. GUBERNUR MALUKU UTARA

A. TANRIBALI LAMO

Diundangkan di Sofifi
Pada Tanggal 18 November 2013

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA**

H. A. MADJID HUSEN

Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Nomor ...

LAMPIRAN 1.1 : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 2 TAHUN 2013
TANGGAL : 19 Juli 2013
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI MALUKU
UTARA TAHUN 2013 - 2033
DAFTAR : SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL

- a. Wilayah Sungai Strategis Nasional terdiri dari Wilayah Sungai (WS) halmahera Selatan dan Wilayah Sungai (WS) Halmahera Utara.
- b. Sistem Jaringan Irigasi Nasional yaitu Bendungan Patlean dan Bendungan Wangonira
- c. Daerah Irigasi Nasional meliputi Daerah Irigasi Nasional di Kabupaten/Kota yaitu DI. Patlean dan DI. Wangongira.

WILAYAH SUNGAI STRATEGIS NASIONAL HALMAHERA SELATAN

NO DAS	NAMA DAN DAERAH ALIRAN SUNGAI	NO DAS	NAMA DAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
001	DAS Dowango	066	DAS Maffa
002	DAS Pematango	067	DAS Lamo
003	DAS Akelamo	068	DAS Floa
004	DAS Wayai	069	DAS Batonam
005	DAS Mabulan	070	DAS Tingsonga
006	DAS Tifunus	071	DAS Wasi
007	DAS Afu	072	DAS Barungbarung
008	DAS Lili	073	DAS Wosi
009	DAS Waisango	074	DAS Tima
010	DAS Onat	075	DAS Wemionga
011	DAS Goifati	076	DAS Uboubo
012	DAS Wayamli	077	DAS Gola
013	DAS Galala	078	DAS Dingolaf Besar
014	Das Wala	079	DAS Wali
015	DAS Pekaulang	080	DAS Tagia

NO DAS	NAMA DAN DAERAH ALIRAN SUNGAI	NO DAS	NAMA DAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
016	DAS Gau	081	DAS Saole
017	DAS Gamesan	082	DAS Beua
018	DAS Bukumatiti	083	DAS Liap
019	DAS Wafli	084	DAS Tulebawake
020	DAS Soalapoh	085	DAS Suarat
021	DAS Sangaji	086	DAS Toman
022	DAS Gipyolimbi	087	DAS Warengi
023	DAS Misoliwoyo	088	DAS Sua
024	DAS Gotowasi	089	DAS Gainanu
025	DAS Waci	090	DAS Wagiat
026	DAS Woyokia	091	DAS Botan
027	DAS Biacili	092	DAS Loteungeu
028	DAS Biri	093	DAS Samamalinga
029	DAS Beb	094	DAS Jebubu Besar
030	DAS Oat	095	DAS Duwoi
031	DAS Gawani	096	DAS Falamalongitu
032	DAS Pendi	097	DAS Uoubo
033	DAS Kipin	098	DAS Uoyang
034	DAS Fan	099	DAS Samamaluku
035	DAS Dolon	100	DAS Jaga
036	DAS Lololimdi	101	DAS Kolanomaake
037	DAS Ngangamiango	102	DAS Papaceda
038	DAS Palpopo	103	DAS Kadabu
039	DAS Sakau	104	DAS Rano
040	DAS Yaba	105	DAS Tagli
041	DAS Camece	106	DAS Aji
042	DAS Wasis	107	DAS Lipai

NO DAS	NAMA DAN DAERAH ALIRAN SUNGAI	NO DAS	NAMA DAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
043	DAS Moreala	108	DAS Saketa
044	DAS Biaboki	109	DAS Tango
045	DAS Boliol	110	DAS Lasa
046	DAS Bone	111	DAS Bobiri
047	DAS Doe	112	DAS Bosso
048	DAS Mesa	113	DAS Rogirogi
049	DAS Sepa	114	DAS Tokaka
050	DAS Waleh	115	DAS Moloku
051	DAS Sepo	116	DAS Samo
052	DAS Gemaf	117	DAS Samat
053	DAS Leuef	118	DAS Moang Kecil
054	DAS Kobe	119	DAS Sumea
055	DAS Pegalis	120	DAS Dehopoda
056	DAS Wastulo	121	Gulaci
057	DAS Fidi	122	Lifofa
058	DAS Yeteta	123	DAS Adala
059	DAS Roti	124	DAS Maldi
060	DAS Tilope	125	DAS Tafaga
061	DAS Foya	126	DAS Jorongmadana
062	DAS Kuala Bak	127	DAS Toe
063	DAS Santu	128	DAS Tos
064	DAS Lelubi	129	DAS Nawan
065	DAS Saleo	130	DAS Payahe
131	DAS Tayawi	196	DAS Subabe
132	DAS Koli	197	DAS Salolo
133	DAS Iyadimatiti	198	DAS Kagohi
134	DAS Tufui	199	DAS Kayoa

NO DAS	NAMA DAN DAERAH ALIRAN SUNGAI	NO DAS	NAMA DAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
135	DAS Tawa	200	DAS Guruapin
136	DAS Lola	201	DAS Taneti
137	DAS Loko	202	DAS Latalata
138	DAS Siokona	203	Das Dihuru
139	DAS Roy	204	DAS Kou
140	DAS Tobebato	205	DAS Kota
141	DAS Sabaru	206	DAS Turi Besar
142	DAS Mira	207	DAS Jabubu
143	DAS Oba	208	DAS Supai
144	DAS Kayasa	209	DAS Puacaritos
145	DAS Tagorango	210	DAS Langgudi
146	DAS Ngoguni	211	DAS Imbuibu
147	DAS Tomores	212	DAS Kasituta
148	DAS Pariama	213	DAS Doko
149	DAS Ekor	214	DAS Palamea
150	DAS Minimin	215	DAS Mamang
151	DAS Jawali	216	DAS Ngome
152	DAS Saosari	217	DAS Jojame
153	DAS Wajol	218	DAS Kasolaka
154	DAS Tolawi	219	DAS Kailaka
155	DAS Akesalaka	220	DAS Nyali
156	DAS Wasilae	221	DAS Gilalang
157	DAS Gurua	222	DAS Timonga
158	DAS Subaim	223	DAS Gamnegu
159	DAS Opyang	224	DAS Jalaro
160	DAS Dodoga	225	DAS Nyifnyah
161	DAS Wabti	226	DAS Ramang

NO DAS	NAMA DAN DAERAH ALIRAN SUNGAI	NO DAS	NAMA DAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
162	DAS Tutuli	227	DAS Samalanga
163	DAS Pelengon	228	DAS Tawale
164	DAS Titilengan	229	DAS Wayaua
165	DAS Lolobata	230	DAS Songa
166	DAS Milaning	231	DAS Bibinoy
167	DAS Kokocina	232	DAS Raim
168	DAS Tatuo	233	DAS Batipota
169	DAS Iga	234	DAS Batisa
170	DAS Ngairi	235	DAS Laleba
171	DAS Gagaeti	236	DAS Lanio
172	DAS Buli	237	DAS Mati
173	DAS Tatam	238	DAS Jikolamo
174	DAS Hapihaoa	239	DAS Orimaoho Kecil
175	DAS Niniwi	240	DAS Wayamoha
176	DAS Cepang	241	DAS Turpana
177	DAS Lobilobi	242	DAS Linggua
178	DAS Jerawai	243	DAS Salowako
179	DAS Tuma	244	DAS Ngame
180	DAS Tadena	245	DAS Permasang
181	DAS Dabanang	246	DAS Bilik
182	DAS Tanjung	247	DAS kubung
183	DAS Gomang	248	DAS Subusubu
184	DAS Fitako	249	DAS Tuakang
185	DAS Kibal	250	DAS Kupai
186	DAS Para	251	DAS Mandaeng
187	DAS Ngofakiaha	252	DAS Inggal
188	DAS Tiowon	253	DAS Sangge

NO	NAMA DAN DAERAH ALIRAN
DAS	SUNGAI
189	DAS Sangapati
190	DAS Uratbaru
191	DAS Bakuli
192	DAS Watakapat
193	DAS Malapa
194	DAS Bobawa
195	DAS Toboso

NO	NAMA DAN DAERAH ALIRAN
DAS	SUNGAI
254	DAS Indamut
255	DAS Kapulusan
256	DAS Sumatinggi
257	DAS Bobo
258	DAS Kusubabi
259	DAS Ahadau
260	DAS Waya
261	DAS Harumbane
262	DAS Mandoli
263	DAS Damai
264	DAS Hasi
265	DAS Gebe

WILAYAH SUNGAI STRATEGIS NASIONAL HALMAHERA UTARA

NO	NAMA DAN DAERAH ALIRAN
DAS	SUNGAI
001	DAS Susupu
002	DAS Melalomo
003	DAS Lelei
004	DAS Pusu
005	DAS Pakawani
006	DAS Tapi
007	DAS Pitau
008	DAS Saeo
009	DAS Dodowo
010	DAS Limau
011	DAS Tohaki
012	DAS Togowa
013	DAS Lututo
014	DAS Lobe

NO	NAMA DAN DAERAH ALIRAN
DAS	SUNGAI
068	DAS Wayabula
069	DAS Tutuhu
070	DAS Morotai
071	DAS Tatamo
072	DAS Cio
073	DAS Libano
074	DAS Hapo
075	DAS Bere-bere Kecil
076	DAS Sopi
077	DAS Aru
078	DAS Pengeo
079	DAS Lusuo
080	DAS Kocago
081	DAS Ngisio

NO DAS	NAMA DAN DAERAH ALIRAN SUNGAI	NO DAS	NAMA DAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
015	DAS Popila	082	DAS Sakita
016	DAS Gorua	083	DAS Yao
017	DAS Upa	084	DAS Lifao
018	DAS Walaloe	085	DAS Gosomamaluku
019	DAS Mawea	086	DAS Mira
020	DAS Gongamicik	087	DAS Sangowo
021	DAS Tunuo	088	DAS Sangowo Kecil
022	DAS Boing	089	DAS Daeo
023	DAS Daru	090	DAS Sabatai
024	DAS Jati	091	DAS Sabatai Tua
025	DAS Soasang Aji	092	DAS Cao
026	DAS Kao	093	DAS Sabala
027	DAS Wadengolak	094	DAS Aha
028	DAS Taolas	095	DAS Raja
029	DAS Domudomu	096	DAS Bobo
030	DAS Tabanoma	097	DAS Moleo
031	DAS Pipi	098	DAS Hiri
032	DAS Kosidi	099	DAS Tobololo
033	DAS Goluk	100	DAS Kulaba
034	DAS Domera	101	DAS Togurara
035	DAS Lakara	102	DAS Marikrubu
036	DAS Doman	103	DAS Serabu
037	DAS Tawa	104	DAS Fitu
038	DAS Lakata	105	DAS Kastela
039	DAS Lahu	106	DAS Toqualperatu
040	DAS Salakul	107	DAS Takome
041	DAS Sidangoli	108	DAS Maitara
042	DAS Tataleka	109	DAS Salo
043	DAS Tuaralamo	110	DAS Dowora
044	DAS Tuduwangi	111	DAS Gilo

NO DAS	NAMA DAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
045	DAS Liano
046	DAS Lamo
047	DAS Peot
048	DAS Ngarulamo
049	DAS Baru
050	DAS Sasur
051	DAS Tahato
052	DAS Ibu
053	DAS Butu
054	DAS Ngolo
055	DAS Loloda
056	DAS Tasomolo
057	DAS Ngajam
058	DAS Asimiro
059	DAS Dorume
060	DAS Puru
061	DAS Doitia
062	DAS Satu
063	DAS Tolalo
064	DAS Ilafameko
065	DAS Kamufa
066	DAS Gisi
067	DAS Pacao

NO DAS	NAMA DAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
112	DAS Fubrai
113	DAS Nasi
114	DAS Subodo
115	DAS Lobi
116	DAS Lola
117	DAS Soasio
118	DAS Sumkusu
119	DAS Siko
120	DAS Kahatola
121	DAS Salangadeke
122	DAS Gandasuli
123	DAS Dama
124	DAS Tulunu
125	DAS Kokara Besar
126	DAS Tagalaya
127	DAS Miti
128	Magalinu
129	DAS Gamolamo
130	DAS Bubale

Pj. GUBERNUR MALUKU UTARA

A TANRIBALI LAMO

**LAMPIRAN 1.1 : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 2 TAHUN 2013
TANGGAL : 19 Juli 2013
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
MALUKU UTARA TAHUN 2013 – 2033
DAFTAR : SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI**

- a. Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota terdapat di kepulauan Sula dan Obi
- b. Sistem Jaringan irigasi Provinsi meliputi bendungan, jaringan saluran irigasi dan Daerah Irigasi. Sistem Jaringan irigasi Provinsi terdapat di Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Tengah dan kabupaten Halmahera Selatan
- c. Sistem jaringan Air Minum meliputi jaringan air minum perkotaan dan jaringan air minum perdesaan. Jaringan air minum perkotaan terdapat di ibu kota Kabupaten Kota yang dilayani oleh Perusahaan daerah Air Minum (PDAM) yaitu Sula, Tidore, Ternate, Jailolo, Bacan, Daruba dan Tobelo. Untuk ibukota Kabupaten halmahera Tengah dilayani oleh Kantor Pelayanan Air Minum sedangkan untuk Kabupaten Halmahera Timur dilayani UPTD air minum. Sistem Jaringan Air Minum di Perdesaan dikelola oleh Kelompok Masyarakat Pengelola Air Minum
- d. Cekungan Air Tanah (CAT) Provinsi meliputi CAT Ternate, CAT Tidore, CAT Daruba Bere – Bere, CAT Posi – Posi, CAT Galela, CAT Tobelo, CAT Ibu, CAT Kao, CAT Jailolo Sidangoli, CAT Payahe, CAT Mafa, CAT Sagea, CAT Wasile, CAT Akelamo, CAT Patani, CAT Wosi, CAT Kasiruta, CAT Mandioli, CAT Labuha, CAT Lansa, CAT Bisa, CAT Taino, CAT Sesepe, CAT Jobubu, CAT Sanana.

Nama Daerah Irigasi di Provinsi Maluku Utara

No	Nama Daerah Irigasi (D.I)	Kabupaten / Kota	Wilayah Sungai (D A S)	Kewenangan
1	D.I Patlean / Akelamo	Halmahera Timur	Halmahera Selatan	Pusat
2	D.I Wangongira	Halmahera Utara	Halmahera Selatan	Pusat
3	D.I. Toboulamo	Halmahera Utara	Halmahera Utara	Provinsi
4	D.I. malifut	Halmahera Utara	Halmahera Utara	Provinsi
5	D.I. Biang	Halmahera Utara	Halmahera Utara	Provinsi
6	D.I. Toliwang	Halmahera Utara	Halmahera Utara	Provinsi
7	D.I. Leleseng	Halmahera Utara	Halmahera Utara	Provinsi
8.	D.I. Aha	Pulau Morotai	Halmahera Utara	Provinsi
9	D.I. Pilowo	Pulau Morotai	Halmahera Utara	Provinsi
10	D.I. Talaga	Halmahera Barat	Halmahera Utara	Provinsi
11	D.I. Jani	Halmahera Barat	Halmahera Utara	Provinsi
12	D.I. Jailolo	Halmahera Barat	Halmahera Utara	Provinsi
13	D.I. Goal	Halmahera Barat	Halmahera Utara	Provinsi
14	D.I. Loloda	Halmahera Barat	Halmahera Utara	Provinsi

No	Nama Daerah Irigasi (D.I)	Kabupaten / Kota	Wilayah Sungai (D A S)	Kewenangan
15	D.I. Susupu	Halmahera Barat	Halmahera Utara	Provinsi
16	D.I. Tousia	Halmahera Barat	Halmahera Utara	Provinsi
17	D.I. Sahu	Halmahera Barat	Halmahera Utara	Provinsi
18	D.I. Opiyang	Halmahera Timur	Halmahera Selatan	Provinsi
19	D.I. Akelamo	Halmahera Timur	Halmahera Selatan	Provinsi
20	D.I. sagea	Halmahera Timur	Halmahera Selatan	Provinsi
21	D.I. Tutiling	Halmahera Timur	Halmahera Selatan	Provinsi
22	D.I. Ekor	Halmahera Timur	Halmahera Selatan	Provinsi
23	D.I. Akedaga	Halmahera Timur	Halmahera Selatan	Provinsi
24	D.I. Meja	Halmahera Timur	Halmahera Selatan	Provinsi
25	D.I. Wayamli	Halmahera Timur	Halmahera Selatan	Provinsi
26	D.I. Dorosagu I, II	Halmahera Timur	Halmahera Selatan	Provinsi
27	D.I. Wairoro	Halmahera Tengah	Halmahera Selatan	Provinsi
28	D.I. Kobe	Halmahera Tengah	Halmahera Selatan	Provinsi
29	D.I. Bibinohi	Halmahera Selatan	Halmahera Selatan	Provinsi

No	Nama Daerah Irigasi (D.I)	Kabupaten / Kota	Wilayah Sungai (D A S)	Kewenangan
30	D.I. Obi	Halmahera Selatan	Halmahera Selatan	Provinsi
31	D.I. Sayoang	Halmahera Selatan	Halmahera Selatan	Provinsi
32	D.I. Geti	Halmahera Selatan	Halmahera Selatan	Provinsi
33	D.I. Goro – goro	Halmahera Selatan	Halmahera Selatan	Provinsi
34	D.I. Gane Timur	Halmahera Selatan	Halmahera Selatan	Provinsi
35	D.I. Kahoho (Tayawi)	Kota Tidore Kepulauan	Halmahera Selatan	Provinsi
36	D.I. Cinga	Kota Tidore Kepulauan	Halmahera Selatan	Provinsi
37	D.I. Maidi	Kota Tidore Kepulauan	Halmahera Selatan	Provinsi
38	D.I. Jorjoga	Kepulauan sula	-	Provinsi
39	D.I. Kilo	Kepulauan Sula	-	Provinsi
40	D.I. Waimiha	Kepulauan Sula	-	Provinsi
41	D.I. Tolabit (Makarti)	Halmahera Utara	Halmahera Utara	Kabupaten
42	D.I. Pediwang	Halmahera Utara	Halmahera Utara	Kabupaten
43	D.I. Dorolamo	Halmahera Utara	Halmahera Utara	Kabupaten

No	Nama Daerah Irigasi (D.I)	Kabupaten / Kota	Wilayah Sungai (D A S)	Kewenangan
44	D.I. Gagapok	Halmahera Utara	Halmahera Utara	Kabupaten
45	D.I. Tiley	Pulau Morotai	Halmahera Utara	Kabupaten
46	D.I. Daeo	Pulau Morotai	Halmahera Utara	Kabupaten
47	D.I. Wewemo	Pulau Morotai	Halmahera Utara	Kabupaten
48	D.I. Sangowo	Pulau Morotai	Halmahera Utara	Kabupaten
49	D.I. bohu – Bohu	Pulau Morotai	Halmahera Utara	Kabupaten
50	D.I. Sambiki	Pulau Morotai	Halmahera Utara	Kabupaten
51	D.I. Hoku – Hoku	Pulau Morotai	Halmahera Utara	Kabupaten
52	D.I. Forniti	Halmahera Barat	Halmahera Utara	Kabupaten
53	D.I. Gamtala	Halmahera Barat	Halmahera Utara	Kabupaten
54	D.I. Lolori	Halmahera Barat	Halmahera Utara	Kabupaten
55	D.I Toboso	Halmahera Barat	Halmahera Utara	Kabupaten
56	D.I. Dodaga	Halmahera Timur	Halmahera Selatan	Kabupaten
57	D.I. Mancalele	Halmahera Timur	Halmahera Selatan	Kabupaten
58	D.I. Wayana	Halmahera Selatan	Halmahera Selatan	Kabupaten
59	D.I. Kosa	Halmahera Selatan	Halmahera Selatan	Kabupaten
60	D.I. Bale	Halmahera Selatan	Halmahera Selattan	Kabupaten

**WILAYAH SUNGAI LINTAS KABUPATEN / KOTA
KEPULAUAN SULA – OBI**

NO DAS	NAMA DAN DAERAH ALIRAN SUNGAI	NO DAS	NAMA DAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
001	DAS Balohal	093	DAS Della
002	DAS Todeli	094	DAS Pot
003	DAS Pango	095	DAS Gafo
004	DAS Samada Kecil	096	DAS Tinagal
005	DAS Samada Besar	097	DAS Batai
006	DAS Sambada	098	DAS Lab
007	DAS Fakayu	099	DAS Kadau
008	DAS Sahu	100	DAS Buaya Kecil
009	DAS Sanabong	101	DAS Madufuhi
010	DAS Way Nudu	102	DAS Babura
011	DAS Way Buaya	103	DAS Auphania
012	DAS Nabi	104	DAS Buluhaya
013	DAS Dege	105	DAS Kena
014	DAS Way Hay	106	DAS Ipa
015	DAS Tuma	107	DAS Gamahi
016	DAS Kobu	108	DAS Nin
017	DAS Way Palata	109	DAS Kalopa
018	DAS Mananga	110	DAS Sanana
019	DAS Way Teniti	111	DAS Fogi
020	DAS Bua	112	DAS Ina
021	DAS Mbono	113	DAS Uapota
022	DAS Kabuha	114	DAS Umasugi
023	DAS Made	115	DAS Waloga
024	DAS Dratu	116	DAS Fokabata
025	DAS Hene	117	DAS Hui
026	DAS Kawaya	118	DAS Sewa
027	DAS Tenamu	119	DAS Umadera
028	DAS Parigi	120	DAS Daora

NO DAS	NAMA DAN DAERAH ALIRAN SUNGAI	NO DAS	NAMA DAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
029	DAS Wasa	121	DAS Nib
030	DAS Fota	122	DAS Sahewi
031	DAS Nata	123	DAS Busa
032	DAS Ncapa	124	DAS Baleha
033	DAS Gandolo	125	DAS Gay
034	DAS Lagoi	126	DAS Bega
035	DAS Koka	127	DAS Fuata
036	DAS Faku	128	DAS Pahu
037	DAS Mono	129	DAS Seko
038	DAS Sairisi	130	DAS Gupa
039	DAS Palaso	131	DAS Telaga Kerbau
040	DAS Way Kadai	132	DAS Tabiha
041	DAS Husu	133	DAS Ballai
042	DAS Kiha	134	DAS Fasra
043	DAS Kuyu	135	DAS Hela
044	DAS Sangbo	136	DAS Noagadi
045	DAS Kawadang	137	DAS Goa
046	DAS Sotan	138	DAS Nawan
047	DAS Niyu	139	DAS Air Cermin
048	DAS Nayo	140	DAS Bopo
049	DAS Tabona	141	DAS Tabuji
050	DAS Kampung Baru	142	DAS Kadera
051	DAS Mina	143	DAS Lalepange
052	DAS Kilo	144	DAS Lawui
053	DAS Miha	145	DAS Anggai
054	DAS Wendi	146	DAS Lale
055	DAS Dionidi	147	Das Dihuru
056	DAS Langsa	148	DAS Amehose
057	Das Lipomo	149	DAS Laratu
058	DAS Gegasi	150	DAS Koto

NO DAS	NAMA DAN DAERAH ALIRAN SUNGAI	NO DAS	NAMA DAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
059	DAS Lalo	151	DAS Sobapa
060	DAS Kano	152	DAS Songara
061	DAS Tamundu	153	DAS Bumi
062	DAS Seho	154	DAS Taba
063	DAS Kilong	155	DAS Tawa Besar
064	DAS Deluma	156	DAS Tawa Kecil
065	DAS Bringin Jaya	157	DAS Tangatanga
066	DAS Lisa	158	DAS Tanjung Kelapa
067	DAS Limbo	159	DAS Tohodoku
068	DAS Telaga	160	DAS Seramaloleo Besar
069	DAS Lako	161	DAS Bobor
070	DAS Sangatalo	162	DAS Kualawedi Besar
071	DAS Tabulu	163	DAS Bobo Besar
072	DAS Binongkil	164	DAS Gosora
073	DAS Way Lei	165	Das Dobe
074	DAS Saniahaya	166	DAS Aru
075	DAS Salaobi	167	DAS Fluk
076	DAS Koro	168	DAS Nike
077	DAS Puyu	169	DAS Doko
078	DAS Salaku	170	DAS Tapaya
079	DAS Loba	171	DAS Wayaloar
080	DAS Bantala	172	DAS Magam
081	DAS Todantalo	173	DAS Rijang
082	DAS Mapsoha	174	DAS Daraku
083	DAS Kortata	175	DAS Soligi
084	DAS Nunu	176	DAS Akalamo
085	DAS Banua	177	DAS Loji
086	DAS Uji	178	DAS Malamala

NO DAS	NAMA DAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
087	DAS Ufamatola
088	DAS Saksi
089	DAS Liafu
090	DAS Kauseg
091	DAS Basuka
092	DAS Kau

NO DAS	NAMA DAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
179	DAS Jikohai
180	DAS Belengbelang
181	DAS Tapat
182	DAS Bisa
183	DAS Tobalai
184	DAS Gomumu

Pj. GUBERNUR MALUKU UTARA

A TANRIBALI LAMO

**LAMPIRAN 1.a : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
 NOMOR : 2 TAHUN 2013
 TANGGAL : 19 Juli 2013
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
 MALUKU UTARA TAHUN 2013 – 2033
 DAFTAR : RENCANA SISTEM PERKOTAAN YANG MELIPUTI
 HIRARKI DAN FUNGSI KOTA – KOTA DI PROVINSI
 MALUKU UTARA TAHUN 2033**

No	Hirarki	Gugus Pulau (Wilayah Pengembangan)	Kota/ Ibu Kota Kab / Kec	Skala Pelayanan		A	B	C	D	E	F
				Fungsi	Kewenangan						
1.	Pusat/Kegiatan Nasional (PKN)	1	Ternate	Nasional	Provinsi	*	*		*	*	*
	PKN/promosi (PKNp)	1	Sofifi, Tidore	Nasional	Provinsi	*	*		*	*	*
2.	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	1	Tidore (Soasio)	Provinsi	Provinsi	*	*		*	*	
		3	Tobelo,	Provinsi	Provinsi		*		*	*	
		6	Labuha	Provinsi	Provinsi		*		*	*	
		7	Sanana	Provinsi	Provinsi		*		*	*	
3.	Pusat/Kegiatan Wilayah/promosi (PKWp)	2,4,5,	Weda, Maba, Buli Cemara, Jaya, Jailolo Jaya, Jailolo Sidangoli, Bere-Bere	Provinsi	Provinsi		*		*	*	
4.	Pusat/Kegiatan Strategis/Nasional (PKSN)	4	Daruba	Nasional	Nasional		*	*	*	*	
5.	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	3	Galela	Regional	Kabupaten		*		*	*	
		3	Kao	Regional	Kabupaten		*		*	*	
		3	Malifut	Regional	Kabupaten		*		*	*	
		2	Kedi	Regional	Kabupaten		*		*	*	
		2	Tongutesungi	Regional	Kabupaten		*		*	*	
		2	Susupu	Regional	Kabupaten		*		*	*	
		8	Bobong	Regional	Kabupaten		*		*	*	
		7	Falabisahaya	Regional	Kabupaten		*		*	*	
		7	Dofa	Regional	Kabupaten		*		*	*	
		5	Patani	Regional	Kabupaten		*		*	*	
		5	Gebe	Regional	Kabupaten		*		*	*	
		5	Lelilef	Regional	Kabupaten		*		*	*	
		5	Wairoro	Regional	Kabupaten		*		*	*	
		4	Wayabula	Regional	Kabupaten		*		*	*	
		6	Guruapin	Regional	Kabupaten		*		*	*	
		6	Maffa	Regional	Kabupaten		*		*	*	
6	Saketa	Regional	Kabupaten		*		*	*			
6	Babang	Regional	Kabupaten		*		*	*			
4	Sopi	Regional	Kabupaten		*		*	*			

- A : Pusat Administrasi Provinsi/Kabupaten
- B : Pusat perdagangan, jasa dan pemasaran
- C : Pusat perhubungan dan Komunikasi
- D : Pusat produksi pengolahan
- E : Pusat pelayanan sosial(kesehatan, pendidikan dan lainnya)
- F : Pusat pendidikan tinggi

Pj. GUBERNUR MALUKU UTARA

A TANRIBALI LAMO

LAMPIRAN 1.b : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 2 TAHUN 2013
TANGGAL : 19 Juli 2013
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2013 – 2033
DAFTAR : RENCANA JARINGAN JALAN YANG MENGHUBUNGAN KOTA - KOTA PKN, PKW, PKSN DAN PKL

Rencana Jaringan Jalan Maluku Utara

Nomor Ruas	Nama Ruas	Fungsi	Status	Panjang (Km)	Rencana
	Kabupaten Pulau Morotai				
020	Daruba – Daeo	K1	N	26,416	
021	Daeo - Bere – Bere	K1	N	55,691	
020.11	Dalam Kota Daruba	K1	N	10,000	
022	Bere - Bere – Sofi	K1	SN	54,000	N
023	Sofi – Wayabula	K1	SN	35,000	N
024	Wayabula – Daruba	K1	SN	52,000	N
	Kabupaten Halmahera Utara				
001	Lapangan Terbang Galela	K1	N	14,195	
002	Galela – Tobelo	K1	N	27,161	
002.11	Tobelo - Dermaga Fery	K1	N	0,300	
002.12	Tobelo – Pelabuhan	K1	N	0,450	
003	Tobelo – Podiwang	K1	N	48,625	
004	Podiwang – Kao	K1	N	33,766	
005	Kao – Boso	K1	N	72,120	
050	Lapter - Galela Kedi	K2	P	43,000	N
051.1	Kao – Toliwang	K2	P	33,000	SNR
051.2	Toliwang – Tolabit	K2	P	6,000	

Nomor Ruas	Nama Ruas	Fungsi	Status	Panjang (Km)	Rencana
052	Toliwang – Kusuri	K2	P	26,000	
053	Sp. Tobe Katana	K2	P	13,000	
054.1	Ngidoho – Lapi	K2	P	32,000	
054.1	Lapi – Darume	K2	P	68,000	
	Tolabit – Togorebatua	K2	K	24,200	P
	Malifut – Toliwang	K2	K	20,000	SNR
	Kabupaten Halmahera Barat				
006	Boso - Sidangoli Dermaga Fery	K1	N	22,935	
008	Boso - Simpang Dodinga	K1	N	2,030	
009	Simpang Dodinga - Sofifi	K1	N	36,663	
016	SP Dodinga – Bobaneigo	K1	N	2,946	
'007	SP Sidangoli – Jailolo	K1	SN	32,400	N
033.1	Jailolo – Goal	K1	P	21,190	SNR
034.3	Goal – Ibu	K1	P	35,000	SNR
034.3	Ibu – Kedi	K1	P	67,600	SNR
054.2	SP. Dodinga - Dodinga (Dermaga)	K1	P	3,300	
	Ibu – Togorebatua	K2	K		SNR
	Kota Tidore Kepulauan				
010	Sofifi - Akelamo	K1	N	22,466	
011	Akelamo - Payahe	K1	N	49,862	
027	Keliling Pulau Tidore	K1	SN	45,145	N
	Dermaga Sofifi - SP Galala	K2	K	5,500	P
	Sofifi - Bukit Durian	K2	K	2,600	P
	Bukulasa - Barumadehe	K2	K	2,000	P
	Guraping - Akeklano	K2	K	9,500	P
	Akekolano - Oba	K2	K	3,000	P
	Oba - Somahode	K2	K	3,000	P
	Somahode - Garojou	K2	K	1,500	P
	Guraping - Sp Ake Gosale	K2	K	5,000	P

Nomor Ruas	Nama Ruas	Fungsi	Status	Panjang (Km)	Rencana
	Kabupaten Halmahera Tengah				
012	Payahe - Weda	K1	N	23,487	
013	Weda - Mafa	K1	SN	50,000	
058.1	Weda - Sagae	K1	P	50,00	N
	Sagae - Patani	K2	K	61,000	SNR
	Patani - Tepeleo	K2	K	6,95	SNR
	Tepelo - Sakam	K2	K	28,40	SNR
	Sakam - Bicoli	K2	K	15,000	SNR
	Kolibale - Sp. Sagea	K2	K	28,600	P
	Kabupaten Halmahera Timur				
017	Bobaneigo - Ekor	K1	SN	39,348	N
018	Ekor - Subaim	K1	SN	63,445	N
019	Subaim - Buli	K1	SN	51,467	N
059.2	Buli - Gotowase	K1	P	45,000	SNR
037	Subaim - Dodaga	K1	P	61,000	
	Buli - Lapangan Terbang	K1	P	15,000	N
039	Sagae - Gotowase	K1	P	60,000	SNR
	Lapter - Wayamli	K2	K	23,56	SNR
	Miaf - Lolasita	K2	K	30,610	SNR
	Lolasita - Patlean	K2	K	54,280	SNR
	Patlean - Jara Jara	K2	K	40,000	SNR
	Jara Jara - Bololo	K2	K	32,000	SNR
	Bololo - Labi Labi	K2	K	30,000	SNR
	Labi Labi - Lolobata	K2	K	88,600	SNR
	Lolobata - Subaim	K2	K	37,930	SNR
	Kabupaten Halmahera Selatan				
025	Labuha - Babang	K1	N	18,320	
014	Mafa - Matuting	K1	SN	43,000	N
015	Matuting - Saketa	K1	SN	21,000	N
040.2	Labuha - Sawadai	K1	P	35,000	SNR
040.3	Babang - Yada	K1	P	40,000	SNR
041	Keliling Pulau Makian	K1	P	36,000	SNR
042	Laiwui - Jikotamo - Anggai	K1	P	24,000	SNR

Nomor Ruas	Nama Ruas	Fungsi	Status	Panjang (Km)	Rencana
043.1	Laiwui - Jikodolong	K1	P	28,000	
043.2	Jikodolong - Wailoar -Sum	K1	P	60,000	
044	Gurapin - Modayama	K1	P	20,000	
045.2	Matuting - Ranga-ranga	K1	P	30,000	
045.3	Ranga-ranga - Saketa	K1	P	21,000	
046.1	Saketa - Dehepodo	K1	P	68,000	SNR
046.2	Dahepodo - Payahe	K1	P	46,000	SNR
	Babang - Songa	K2	K	20,000	SNR
	Songa - Wayatim	K2	K	42,000	SNR
	Labubi – Samo	K2	K	45,000	SNR
	Kota Ternate				
026	Keliling Pulau Ternate	K1	N	46,004	
026.13	Jl. Bastiong - Jambula/Pelabuhan Tte	K1	N	7,012	
026.11	Jl. Bandara Babullah	K1	N	0,750	
026.12	Jl. Pemuda	K1	N	2,898	
026.13	Jl. Sultan Khairun	K1	N	0,720	
026.14	Jl. Merdeka	K1	N	0,480	
026.13	Jl. Arnold Mononutu	K1	N	0,700	
026.14	Jl. Jend. A. Yani	K1	N	0,490	
026.14	Jl. Hasan Esa	K1	N	0,875	
026.14	Jl. Mangga Dua	K1	N	0,923	
026.15	Jl. Bastiong	K1	N	0,985	
026.1A	Dermaga Fery - Bastiong	K1	N	0,220	
	Kabupaten Kepulauan Sula				
026	Sanana – Manaf	K1	P	31,860	N
026.2	Manaf - Fatkauyon	K1	P	16,000	N
026.3	Fatkauyon - Way Ina	K1	P	20,000	
027	Sanana – Pohea	K1	P	12,050	N
027.2	Pohea – Malbufa	K1	P	12,000	N
027.3	Malbufa - Way Ina	K1	P	46,000	

Nomor Ruas	Nama Ruas	Fungsi	Status	Panjang (Km)	Rencana
070	bobong – Tikong	K1	P	58,000	N
028.2	Tikong – Tobang	K1	P	40,000	
028.3	Tobang – Samuya	K1	P	25,000	
	Samuya – Loseng	K2	K	40,000	SNR
071	Dofa - Falabisahaya	K1	P	20,500	SNR
029.2	Falabisahaya - Wailoba	K1	P	30,000	
030	Dofa - Aufonhia	K1	P	33,000	
031	Kaporo - Capalulu	K1	P	23,000	
	Capalulu - Waytina	K2	K	14,000	SNR

Keterangan :

- N : Jalan Nasional
- SN : Jalan Strategi Nasional
- SNR : Jalan Strategi Nasional Rencana
- P : Jalan Jalan Provinsi
- K : Jalan Kabupaten
- K1 : Kolektor 1
- K2 : Kolektor 2

Pj. GUBERNUR MALUKU UTARA

A TANRIBALI LAMO

**LAMPIRAN 1.c : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
 NOMOR : 2 TAHUN 2013
 TANGGAL : 19 Juli 2013
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
 MALUKU UTARA TAHUN 2013 – 2033
 DAFTAR : RENCANA TERMINAL PENUMPANG**

NO	TERMINAL ANGKUTAN DI TIAP KOTA/KABUPATEN		STATUS	KEBERADAAN	
				EKSISTING	RENCANA
A. KOTA TERNATE					
	1	Terminal Gamalama	Type C	1	-
	2	Terminal Bastiong	Type C	1	-
	3	Terminal Dufa – Dufa	Type C	1	-
	4	Terminal Sulamadaha	Type C	-	1
	5	Terminal Gambesi	Type C	-	1
B. KOTA TIDORE KEPULAUAN					
	1	Terminal Sofifi (P.Halmahera)	Type B		1
	2	Terminal Akelamo (P.Halmahera)	Type C		1
	3	Terminal Payahe (P.Halmahera)	Type C	-	1
	4	Terminal Batula (P.Halmahera)	Type C	-	1
	5	Terminal Soasio (P. Tidore)	Type C	1	-
	6	Terminal rum (P. Tidore)	Type C	1	-
	7	Terminal Goto (P. Tidore)	Type C	-	1
C. KABUPATEN HALMAHERA BARAT					
	1	Terminal Sidangoli (P. Halmahera)	Type C	1	-

	2	Terminal Goal (P. Halmahera)	Type C	1	-
	3	Terminal Ibu (P.Halmahera)	Type C	-	1
	4	Terminal loloda (P. Halmahera)	Type C	-	1
	5	Terminal Boso (P. Halmahera)	Type C	-	1
	6	Terminal Dodinga (P. Halmahera)	Type C	-	1
D.	KABUPATEN HALMAHERA UTARA				
	1	Terminal Tobelo (P. Halmahera)	Type B		1
	2	Terminal Galela (P. Halmahera)	Type C	1	-
	3	Terminal Malifut (P. Halmahera)	Type C	1	-
	4	Terminal Kao (P. Halmahera)	Type C	-	1
	5	Terminal Pediwang (P. Halmahera)	Type C	-	1
	6	Terminal Susupu (P.Halmahera)	Type C	-	1
E.	KABUPATEN PULAU MOROTAI				
	1	Terminal Daruba (P. Morotai)	Type C	1	-
	2	Terminal Wayabula (P. Morotai)	Type C	-	1
	3	Terminal Sangowo (P. Morotai)	Type C	-	1
	4	Terminal Sopi (P. Morotai)	Type C	-	1
	5	Terminal Bere - bere (P. Morotai)	Type C	-	1
F.	KABUPATEN HALMAHERA TIMUR				
	1	Terminal Maba (P. Halmahera)	Type B		1

	2	Terminal Buli (P. Halmahera)	Type C	1	-
	3	Terminal Ekor (P. Halmahera)	Type C	-	1
	4	Terminal Subaim (P. Halmahera)	Type C	-	1
	5	Terminal Tatam (P. Halmahera)	Type C	-	1
	6	Terminal Bilolo (P. Halmahera)	Type C	-	1
	7	Terminal Dorosagu (P. Halmahera)	Type C	-	1
	8	Terminal Patlean (P. Halmahera)	Type C	-	1
	9	Terminal Gotowase (P. Halmahera)	Type C	-	1
G.	KABUPATEN HALMAHERA TENGAH				
	1	Terminal Weda (P. Halmahera)	Type B		1
	2	Terminal Foya (P. Halmahera)	Type C	-	1
	3	Terminal Lelief (P. Halmahera)	Type C	-	1
	4	Terminal Banema (P. Halmahera)	Type C	-	1
	5	Terminal Patani (P. Halmahera)	Type C	-	1
	6	Terminal Gebe (P. Halmahera)	Type C	1	-
H	KABUPATEN HALMAHERA SELATAN				
	1	Terminal Labuha (P. Bacan)	Type C	1	-
	2	Terminal Babang (P. Bacan)	Type C	1	-

	3	Terminal Indari (P. Bacan)	Type C	-	1
	4	Terminal Yaba (P. Bacan)	Type C	-	1
	5	Terminal Wayakuba (P. Bacan)	Type C	-	1
	6	Terminal Maffa (P. Halmahera)	Type C	-	1
	7	Terminal Saketa (P. Halmahera)	Type C	-	1
	8	Terminal Busui (P. Halmahera)	Type C	-	1
	9	Terminal Ganeluar (P. Halmahera)	Type C	-	1
	10	Terminal Tawa (P. Halmahera)	Type C	-	1
	11	Terminal Leiufi (P. Obi)	Type C	1	-
	12	Terminal Wayaloar (P. Obi)	Type C	-	1
	13	Terminal Mano (P. Obi)	Type C	-	1
	14	Terminal Soligi (P. Obi)	Type C	-	1
I.	KABUPATEN KEPULAUAN SULA				
	1	Terminal Sanana (P. Sulabesi)	Type C	1	-
	2	Terminal Manaf (P. Sulabesi)	Type C	-	1
	3	Terminal Kabau (P. Sulabesi)	Type C	-	1
	4	Terminal Waikalopa (P. Sulabesi)	Type C	-	1
	5	Terminal Dofa (P. Mangoli)	Type C	1	-
	6	Terminal Mangoli (P. Mangoli)	Type C	-	1
	7	Terminal Kawata (P. Mangoli)	Type C	-	1
	8	Terminal Wailoba (P. Mangoli)	Type C	-	1
	9	Terminal Baruakol (P. Mangoli)	Type C	-	1

	10	Terminal Bobong (P. Taliabu)	Type C	-	1
	11	Terminal Tikong (P. Taliabu)	Type C	-	1
	12	Terminal Jorjoga (P. Taliabu)	Type C	-	1
	13	Terminal Barenu (P. Taliabu)	Type C	-	1
	14	Terminal Samuya (P. Taliabu)	Type C	-	1
	15	Terminal Loseng (P. Taliabu)	Type C	-	1

Pj. GUBERNUR MALUKU UTARA

A TANRIBALI LAMO

LAMPIRAN 1.e : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 2 TAHUN 2013
TANGGAL : 19 Juli 2013
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI MALUKU
UTARA TAHUN 2013 - 2033
DAFTAR : RENCANA ALUR PELAYARAN

ALUR PELAYARAN INTERNASIONAL

Negara Tujuan	Lokasi Pelabuhan
Australia	Dampier, Sidney, Adelaide, Melbourne
Jepang	Yokohama, Kobe, Osaka, Nagoya, Hakata, Tokyo, Chiba
Amerika Serikat	New York/New Jersey, Los Angeles, Long Beach
Filipina	Manila (Luzon)
Cina	Shanghai
Hongkong	Hongkong
Taiwan	Kaohsiung
Korea	Busan

Alur Pelayaran Nasional

Provinsi Tujuan	Lokasi Pelabuhan
Maluku – Maluku	Namlea, Ambon, Saumlaki
Sulut – Maluku	Bitung, Manado, Satal
Papua Barat – Maluku	Sorong, Kabare (Raja Ampat), Saonek (Raja Ampat), Fak – fak, Manokwari, Waisai (Raja Ampat)
Sulteng – Maluku	Banggai, Toli – toli
Sultra – Maluku	Bau – bau
Sulsel – Maluku	Makassar
Papua – Maluku	Biak, Jayapura
Jatim – Maluku	Surabaya
Kaltim – Maluku	Balikpapan, Samarinda, Tarkan
Kalsel – Maluku	Banjarmasin

Alur Pelayaran Antar Kabupaten

Kabupaten / Kota Tujuan	Lokasi Pelabuhan
Halmahera Utara	Tobelo
Halmahera Selatan	Bacan
Pulau morotai	Morotai

Kepulauan Sula	Sanana
Halmahera Tengah	Weda
Halmahera Timur	Maba
Halmahera Barat	Jailolo
Kota Tidore	Tidore

Alur Pelayaran Rakyat

Rencana Alur Pelayaran Rakyat	Lokasi Pelabuhan
Ternate	Rum Tidore
Ternate	Maitara
Ternate	Batang Dua
Ternate	Moti
Ternate	Jailolo
Ternate	Loloda
Ternate	Ibu
Ternate	Kedi
Ternate	Susupu
Ternate	Dodinga
Ternate	Sidangoli
Ternate	Oba
Ternate	Gita
Ternate	Payahe
Ternate	Saketa
Ternate	Batulak
Ternate	Soa Sio
Ternate	Moti
Ternate	Makian
Ternate	Kayoa
Ternate	Lelei
Ternate	Busua
Ternate	Babang / Labuha
Rencana Alur Pelayaran Rakyat	Lokasi Pelabuhan
Ternate	Obi
Ternate	Sanana
Ternate	Dofa
Ternate	Bobong

Ternate	Falabisahaya
Ternate	Gane Barat
Ternate	Gane Timur
Ternate	Patani
Ternate	Gebe
Ternate	Subaim
Ternate	Wasilei
Ternate	Ekor
Ternate	Bobaneigo
Ternate	Kao
Ternate	Galela
Ternate	Daruba
Ternate	Bere Bere
Ternate	Posi – posi
Ternate	Wayabula
Ternate	Dama
Tidore	Maitara
Tidore	Mare
Tidore	Moti
Tidore	Gita
Tidore	Sofifi
Tidore	Oba
Tidore	Akelamo
Tidore	Payahe
Jailolo	Susupu
Jailolo	Sidangoli
Jailolo	Dodinga
Jailolo	Loloda
Jailolo	Ibu
Jailolo	Kedi
Jailolo	Dama
Daruba	Wayabula
Daruba	Bere bere
Rencana Alur Pelayaran Rakyat	Lokasi Pelabuhan
Daruba	Posi – posi
Daruba	Tobelo
Daruba	Galela
Daruba	Loloda

Daruba	Ibu
Tobelo	Galela
Tobelo	Subaim
Tobelo	Kao
Tobelo	Wasile
Buli	Maba
Buli	Wayamli
Buli	Patani
Buli	Bicoli
Patani	Gebe
Patani	Weda
Patani	Sagea
Patani	Nusliku
Weda	Sagee
Weda	Nusliku
Weda	Gebe
Weda	Maba
Weda	Buli
Laiwui	Bacan
Laiwui	Wailoar
Laiwui	Sanana
Laiwui	Falabisahaya
Laiwui	Dofa
Laiwui	Bobong
Laiwui	Saketa
Babang	Saketa
Babang	Palita
Babang	Loleo Jaya
Babang	Tiga Raja
Babang	Kayoa
Babang	Lelei
Sanana	Buru (Maluku)
Sanana	Falabisahaya
Rencana Alur Pelayaran Rakyat	Lokasi Pelabuhan
Sanana	Dofa
Sanana	Bobong
Kayoa	Makian
Kayoa	Saketa

Kayoa	Payahé
Kayoa	Gita
Makian	Saketa
Makian	Payahé
Makian	Gita
Makian	Moti

Pj. GUBERNUR MALUKU UTARA

A TANRIBALI LAMO

LAMPIRAN 1.f : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 2 TAHUN 2013
TANGGAL : 19 Juli 2013
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
MALUKU UTARA TAHUN 2013 - 2033
DAFTAR : RENCANA KEPELABUHANAN

NO	PELABUHAN LAUT DI TIAP KOTA/KABUPATEN		STATUS	KEBERADAAN	
				EKSISTIN G	RENCANA
A. KOTA TERNATE					
	1	Pelabuhan Ahmad Yani	Utama	1	-
	2	Pelabuhan Bastiong	Pengumpul	1	-
	3	Pelabuhan Dufa - dufa	Pengumpan	1	-
	4	Pelabuhan Sulamadaha	Pengumpan	-	1
	5	Pelabuhan Mayau	Pengumpan	-	1
	6	Pelabuhan Tifure	Pengumpan	-	1
	7	Pelabuhan Hiri	Pengumpan		1
	8	Pelabuhan Moti	Pengumpan		1
B. KOTA TIDORE KEPULAUAN					
	1	Pelabuhan Sofifi	Utama	-	1
	2	Pelabuhan Soasio	Pengumpul	1	-
	3	Pelabuhan rum	Pengumpan	1	-
	4	Pelabuhan Goto	Pengumpan	1	-
	5	Pelabuhan Mare	Pengumpan	-	1
	6	Pelabuhan Akelama	Pengumpan	-	1

	7	Pelabuhan Sofang	Pengumpan	-	1
	8	Pelabuhan Payahe	Pengumpan	-	1
	9	Pelabuhan Batula	Pengumpan	-	1
C.	KABUPATEN HALMAHERA BARAT				
	1	Pelabuhan Jailolo	Pengumpul	1	-
	2	Pelabuhan Sidangoli	Pengumpan	1	-
	3	Pelabuhan Goal / Talaga	Pengumpan	-	1
	4	Pelabuhan Sahu	Pengumpan	-	1
	5	Pelabuhan Kedi	Pengumpan	-	1
	6	Pelabuhan Ibu	Pengumpan	-	1
	7	Pelabuhan Boso / Akelamo	Pengumpan	-	1
D.	KABUPATEN HALMAHERA UTARA				
	1	Pelabuhan Tobelo	Utama	1	-
	2	Pelabuhan Kao	Pengumpan	-	1
	3	Pelabuhan Pediwang	Pengumpan	-	1
	4	Pelabuhan Galela	Pengumpan	1	-
	5	Pelabuhan Susupu	Pengumpan	-	1
	6	Pelabuhan Dama	Pengumpan	-	1
E.	KABUPATEN KEPULAUAN MOROTAI				
	1	Pelabuhan Daruba	Hub. Internasional	1	-
	2	Pelabuhan Aru	Pengumpan	-	1
	3	Pelabuhan Sangowo	Pengumpan	-	1

	4	Pelabuhan Sopi	Pengumpan	-	1
	5	Pelabuhan Bere – bere	Pengumpan	-	1
	6	Pelabuhan Wayabula	Pengumpan	1	-
F.	KABUPATEN HALMAHERA TIMUR				
	1	Pelabuhan Buli	Utama	1	-
	2	Pelabuhan Maba	Pengumpul	1	-
	3	Pelabuhan Ekor	Pengumpan	-	1
	4	Pelabuhan Wasile	Pengumpan	-	1
	5	Pelabuhan Subaim	Pengumpan	-	1
	6	Pelabuhan Lolobata	Pengumpan	-	1
	7	Pelabuhan Bilolo	Pengumpan	-	1
	8	Pelabuhan Dorosagu	Pengumpan	-	1
	9	Pelabuhan Patlean	Pengumpan	-	1
	10	Pelabuhan Wayamli	Pengumpan	-	1
	11	Pelabuhan Woci	Pengumpan	-	1
	12	Pelabuhan Bicoli	Pengumpan	-	1
G.	KABUPATEN HALMAHERA TENGAH				
	1	Pelabuhan Weda	Pengumpul	1	-
	2	Pelabuhan Foya	Pengumpan	-	1
	3	Pelabuhan Lelilef	Pengumpan	-	1
	4	Pelabuhan Sepo / Sagea	Pengumpan	-	1
	5	Pelabuhan Mesa	Pengumpan	-	1

	6	Pelabuhan Banema	Pengumpan	-	1
	7	Pelabuhan Patani	Pengumpan	1	-
	8	Pelabuhan Gebe	Pengumpan	1	-
H.	KABUPATEN HALMAHERA SELATAN				
	1	Pelabuhan Labuha	Utama	1	-
	2	Pelabuhan babang	Pengumpul	1	-
	3	Pelabuhan Mafa	Pengumpan	-	1
	4	Pelabuhan Busui	Pengumpan	-	1
	5	Pelabuhan Ganeluar	Pengumpan	-	1
	6	Pelabuhan Paspalele	Pengumpan	-	1
	7	Pelabuhan Tawa	Pengumpan	-	1
	8	Pelabuhan Kotiti	Pengumpan	-	1
	9	Pelabuhan Saketa	Pengumpan	1	-
	10	Pelabuhan Doro	Pengumpan	-	1
	11	Pelabuhan Fulai	Pengumpan	-	1
	12	Pelabuhan Dolit	Pengumpan	-	1
	13	Pelabuhan Indari	Pengumpan	-	1
	14	Pelabuhan Yaba	Pengumpan	-	1
	15	Pelabuhan Pigaraja	Pengumpan	1	-
	16	Pelabuhan Wayaua	Pengumpan	1	-
	17	Pelabuhan Garung	Pengumpan	-	1
	18	Pelabuhan Loleojaya	Pengumpan	1	-

	19	Pelabuhan Muari	Pengumpan	-	1
	20	Pelabuhan Taneti	Pengumpan	-	1
	21	Pelabuhan Lelei	Pengumpan	-	1
	22	Pelabuhan Lalin	Pengumpan	-	1
	23	Pelabuhan Gurapin	Pengumpan	-	1
	24	Pelabuhan Loromabati	Pengumpan	1	-
	25	Pelabuhan Ngofakiam/Makian	Pengumpan	1	-
	26	Pelabuhan Leiwui	Pengumpan	1	-
	27	Pelabuhan Soligi	Pengumpan	-	1
	28	Pelabuhan Wayaloar	Pengumpan	1	-
	29	Pelabuhan Mano	Pengumpan	-	1
	30	Pelabuhan Jikotomo	Pengumpan	-	1
	31	Pelabuhan Madopolo	Pengumpan	-	1
I.	KABUPATEN KEPULAUAN SULA				
	1	Pelabuhan Sanana	Utama	1	-
	2	Pelabuhan Dofa	Pengumpul	1	-
	3	Pelabuhan Bobong	Pengumpul	1	-
	4	Pelabuhan Malbufa	Pengumpan	-	1
	5	Pelabuhan Kabau	Pengumpan	-	1
	6	Pelabuhan Fuata	Pengumpan	-	1
	7	Pelabuhan Manaf	Pengumpan	-	1
	8	Pelabuhan Fala	Pengumpan	1	-

	9	Pelabuhan Pas Ipa	Pengumpan	-	1
	10	Pelabuhan Auponia	Pengumpan	-	1
	11	Pelabuhan Baruakol	Pengumpan	-	1
	12	Pelabuhan Mangoli	Pengumpan	-	1
	13	Pelabuhan Waitinia	Pengumpan	-	1
	14	Pelabuhan Wailoba	Pengumpan	-	1
	15	Pelabuhan Samuya	Pengumpan	-	1
	16	Pelabuhan Loseng	Pengumpan	-	1
	17	Pelabuhan Barenu	Pengumpan	-	1
	18	Pelabuhan Nggele	Pengumpan	-	1
	19	Pelabuhan Lede	Pengumpan	-	1
	20	Pelabuhan Tikong	Pengumpan	1	-
	21	Pelabuhan Gela	Pengumpan	-	1
	22	Pelabuhan Jorjoga	Pengumpan	-	1
	23	Pelabuhan Penu	Pengumpan	-	1

Pj. GUBERNUR MALUKU UTARA

A TANRIBALI LAMO

LAMPIRAN 1.g : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 2 TAHUN 2013
TANGGAL : 19 Juli 2013
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI MALUKU
UTARA TAHUN 2013 - 2033
DAFTAR : RENCANA TRANSPORTASI UDARA

Rencana Angkutan Udara Niaga Dalam Negeri

Daerah Tujuan	Nama Bandar Udara
Jakarta	Soekarno – Hatta
Surabaya	Juanda
Jogya	Adisucipto
Solo	Adisumarno
Semarang	Ahmad Yani
Bali	Ngurah Rai
NTB	Lombok
NTT	Eltari
Sulteng	Mutiara
Sultra	Haluoleo
Sulsel	Sultan Hasanuddin
Sulbar	Lagaligo
Gorontalo	Jalaludin
Maluku	Pattimura
Sulut	Samratulangi
Papua	Sentani
Papua Barat	Abresso
Kaltim	Balikpapan, Samarinda, Tarakan
Kalsel	Banjarmasin

Rencana Angkutan Udara Niaga Luar Negeri

Negara Tujuan	Nama Bandar Udara
Australia	Melbourne, Canberra, Sidney, Adeleyde
Jepang	Hanaeda, Tokyo, Narita, Osaka, Kansai
Amerika Serikat	San Fransisco, John F. Keneddy, Los Angeles, Honolulu
Filipina	Cebu – Mactan, davao, Ninoy Aquino, Diosdado

	Macapagal
China	Hanzi Beijing, Baiyun Guangzhou
Taiwan	Taoyuan, Kaohsiung
Hongkong	Hongkong
Korea	Cheongju, Jeju, Muan, Seoul Gimpo

Rencana Angkutan Udara Bukan Niaga Dalam Negeri

Daerah Tujuan	Nama Bandar Udara
Jakarta	Soekarno – Hatta
Surabaya	Juanda
Jogya	Adisucipto
Solo	Adisumarno
Semarang	Ahmad Yani
Bali	Ngurah Rai
NTB	Lombok
NTT	Eltari
Sulteng	Mutiara
Sultra	Haluoleo
Sulsel	Sultan Hasanuddin
Sulbar	Lagaligo
Gorontalo	Jalaludin
Maluku	Pattimura
Sulut	Samratulangi
Papua	Sentani
Papua Barat	Abresso
Kaltim	Balikpapan, Samarinda, Tarakan
Kalsel	Banjarmasin

Rencana Angkutan Udara Bukan Niaga Luar Negeri

Negara Tujuan	Nama Bandar Udara
Australia	Melbourne, Canberra, Sidney, Adeleyde
Jepang	Hanaeda, Tokyo, Narita, Osaka, Kansai
Amerika Serikat	San Fransisco, John F. Keneddy, Los Angeles, Honolulu
Filipina	Cebu – Mactan, davao, Ninoy Aquino, Diosdado

	Macapagal
China	Hanzi Beijing, Baiyun Guangzhou
Taiwan	Taoyuan, Kaohsiung
Hongkong	Hongkong
Korea	Cheongju, Jeju, Muan, Seoul Gimpo

Rencana Pengembangan Kebandarudaraan di Provinsi Maluku Utara

NO	BANDAR UDARA	KOTA / KABUPATEN	KEBERADAAN	
			EKSISTING	RENCANA
1	Bandara Sultan Babullah	Ternate Utara, Kota Ternate	1	-
2	Bandara Kuabang	Kao, Kabupaten Halmahera Utara	1	-
3	Bandara Gamarmalamo	Galela, Kabupaten Halmahera Utara	1	-
4	Bandara Pitu	Daruba, Kabupatten Pulau Morotai	1	-
5	Bandara Buli	Buli, Kabupaten Halmahera Timur	1	-
6	Bandara Weda	Weda, Kabupaten Hamahera Tengah		1
7	Bandara Gebe	Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah	1	-
8	Bandara Usman Sadik	Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan	1	-
9	Bandara Emalamo	Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula	1	-
10	Bandara Mangoli	Fala, Kabupaten kepulauan Sula	1	-
NO	BANDAR UDARA	KOTA / KABUPATEN	KEBERADAAN	
			EKSISTING	RENCANA
11	Bandara Domato	Kabupaten Halmahera Barat	-	1
12	Bandara Bobong	Bobong, Kabupaten Kepulauan Sula	-	1
13	Bandara Leiwui	Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan	-	1

Pj. GUBERNUR MALUKU UTARA

A TANRIBALI LAMO

**LAMPIRAN 1.h : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
 NOMOR : 2 TAHUN 2013
 TANGGAL : 19 Juli 2013
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
 MALUKU UTARA TAHUN 2013 – 2033
 DAFTAR : PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK**

No	Sumber Pembangkit	Lokasi	Daya Terpasang (KW)	Keterangan
1	Tenaga Diesel	Ternate, Soa-siu, Sanana, Bacna, Tobelo, Jailolo, Ibu, Laiwui, Dofa, Bobong, Payahe, Mafa, Weda, Galela, Buli, Sofifi, patani, Daruba, Saketa, Malifut, Kayoa, Lolobata, Subaim, Kedi, Madopolo, Bere – bere, Mangoli, Bicoli, Jiko, Sidangoli, Makian	96,008	
2	Tenaga Uap			Rencana
3	Tenaga Bayu	Halteng, Maba, Pulau Morotai		Rencana
4	Tenaga Air			Rencana
5	Tenaga Mikro Hidro	Halbar, Halut, Kota Tidore, Haltim, Halteng, Halsel, Kepulauan Sula, Pulau Morotai		Rencana
6	Tenaga Surya	Pulau Morotai, Kepulauan Sula, Halsel, Halteng		Rencana
7	Tenaga Panas Bumi	Halbar, halsel, Halut		Rencana
8	Tenaga gelombang Laut			Rencana

No	Sumber Pembangkit	Lokasi	Daya Terpasang (KW)	Keterangan
9	Tenaga Arus Laut	Pulau Morotai Kepulauan Sula	600 KWp	Rencana
10	Tenaga Bio Energi	Kota Tidore, Halteng, Haltim, kepulauan Sula		Rencana

Pj. GUBERNUR MALUKU UTARA

A TANRIBALI LAMO

**LAMPIRAN 1.i : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
 NOMOR : 2 TAHUN 2013
 TANGGAL : 19 Juli 2013
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
 MALUKU UTARA TAHUN 2013 – 2033
 DAFTAR : JARINGAN TENAGA LISTRIK**

No		Panjang Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi	Panjang Jaringan Distribusi	Gardu Induk	Ket
1		2	3	4	5
1	Cabang Ternate	94.08	171.83	230	
2	Ranting Soa Siu	72.42	78.50	73	
3	Ranting Sanana	134.41	34.50	70	
4	Ranting Bacan	148.71	35.36	57	
5	Ranting Tobelo	144.10	68.58	96	
6	Ranting Jailolo	112.26	78.94	70	
7	Kantor Pelayanan Ibu	54.48	33.83	28	
8	Kantor Pelayanan Laiwui	21.50	53.05	13	
9	Kantor Pelayanan Bobong	64.34	22.82	19	
10	Kantor Pelayanan Dofa	34.00	7.75	11	
11	Kantor Pelayanan Payahe	62.29	22.66	17	
12	Kantor Pelayanan Maffa	46.49	27.55	12	
13	Kantor Pelayanan Weda	13.30	7.51	9	
14	Kantor Pelayanan Galela	69.13	26.38	31	
15	Kantor Pelayanan Buli	14.34	9.85	11	
16	Kantor Pelayanan Sofifi	173.14	36.81	75	
17	Kantor Pelayanan Patani	14.60	12.97	9	
18	Kantor Pelayanan Daruba	119.07	58.92	44	
19	Kantor Pelayanan Saketa	63.62	21.00	20	
20	Kantor Pelayanan Malifut	130.93	45.71	46	
21	Kantor Pelayanan Kayoa	27.77	6.36	9	
22	Kantor Pelayanan Lolobata	16.31	7.07	5	
23	Kantor Pelayanan Subaim	30.68	71.80	25	
24	Kantor Pelayanan Kedi	8.51	2.72	6	

No		Panjang Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi	Panjang Jaringan Distribusi	Gardu Induk	Ket
25	Kantor Pelayanan Madopolo	12.08	5.22	6	
26	Kantor Pelayanan Bere – bere	14.32	4.82	6	
27	Kantor Pelayanan Mangoli	12.08	17.04	23	
28	Kantor Pelayanan Bicoli	11.15	9.80	5	
29	Kantor Pelayanan Jiko	15.15	3.71	5	
30	Kantor Pelayanan Sidangoli	48.20	28.03	21	
31	Kantor Pelayanan Makian				Dalam Pelaksanaan

Pj. GUBERNUR MALUKU UTARA

A TANRIBALI LAMO

LAMPIRAN 1.j : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 2 TAHUN 2013
TANGGAL : 19 Juli 2013
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI MALUKU
UTARA TAHUN 2013 - 2033
DAFTAR : DISTRIBUSI MINYAK DAN GAS

No	Jenis Bahan Bakar	Lokasi	Distribusi
1	2	3	4
1	MIGAS		
2	AVGAS		
3	AVTUR	Depo Ternate	
4	MINYAK TANAH	Depo Ternate, Bacan, Sanana, Tobelo	PT. Mitamal Utara, PT. Ternate Gunung Tinggi
5	MINYAK SOLAR	Depo Ternate, Bacan, Sanana, Tobelo	SPBU Kamp. Pisang, SPBU Kalumata, SPBU Batu Anteru, APMS Tidore Kepulauan, APMS Sofifi, APMS Goto Timur Raya, APMS Kota Ternate, APMS Halmahera Tengah, APMS Halmahera Barat, APMS Tobelo, APMS Halmahera Timur, APMS Halmahera Selatan, APMS Sanana, APMS Morotai, Industri Tambang/PLN
6	MINYAK DIESEL	Depo Ternate	
7	MINYAK BERAT	Depo Ternate	
8	BENSIN	Depo Ternate, Bacan, Sanana, Tobelo	SPBU Kamp. Pisang, SPBU Kalumata, SPBU Batu Anteru, APMS tidore Kepulauan, APMS Sofifi, APMS Goto Timur Raya, APMS Kota Ternate, APMS Halmahera Tengah, APMS Halmahera Barat, APMS Tobelo, APMS Halmahera Timur, APMS Halmahera Selatan, APMS Sanana, APMS Morotai
9	BIO PREMIUM		
	BIO PERTAMAX		

Pj. GUBERNUR MALUKU UTARA

A TANRIBALI LAMO

**LAMPIRAN 1.k : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
 NOMOR : 2 TAHUN 2013
 TANGGAL : 19 Juli 2013
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
 MALUKU UTARA TAHUN 2013 – 2033
 DAFTAR : SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI**

No	Jaringan	Lokasi	Keterangan
1	2	3	4
1	Sistem Jaringan Mikro Digital	Ternate – Boso, Boso – Soa Siu, Boso – Wasile – Lolobata, Boso – Tobelo, Boso – Jailolo	
2	Jaringan Serat Optik	Jailolo, Ternate, Sofifi	Palapa Ring Koneksi dari Sulawesi Utara
3	Jaringan Satelit	Ternate, Bacan, Morotai, Sanana, Mangoli	
4	Jaringan Tetap Telekomunikasi	Ternate, Tidore, Halbar, Halut, Morotai, Halsel, Kepulauan Sula	
5	Jaringan Telekomunikasi Khusus	Ternate, Tidore, Halbar, Halut, Halteng, Haltim, Halasel, Morotai, Kepulauan Sula	
6	Jaringan Televisi Lokal	Ternate	3 Stasiun
7	Jaringan Stasiun Radio Lokal	Ternate	8 Stasiun

Pj. GUBERNUR MALUKU UTARA

A TANRIBALI LAMO